

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan wakil rakyat di parlemen yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu) di pusat maupun di daerah. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sedangkan kewajiban anggota DPRD diantaranya yaitu menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Kewajiban ini secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang DPRD bahwa anggota DPRD kabupaten diantaranya mempunyai kewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya (Budiarjo, 1993 : 110).

Keberadaan DPRD di daerah sering di sebut sebagai fungsi representatif karena bertugas menyuarakan aspirasi masyarakat dan bertindak atas nama rakyat (representatif government) di bidang legislatif. Hal tersebut juga merupakan penerapan prinsip demokrasi dimana kedaulatan dan aspirasi masyarakat menjadi hal utama sehingga perlu dibentuk wakil rakyat yang bertugas untuk melakukannya. Sebagai bentuk realisasi dari demokrasi di Indonesia seperti yang dijelaskan diatas,

DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memang tidak bisa dipisahkan dari rakyat karena dalam sistem demokrasi menempatkan rakyat pada urutan pertama sebagai prioritas dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan. Oleh karena DPRD dipilih oleh rakyat sehingga ia harus bekerja untuk rakyat sehingga bentuk hubungan yang dimiliki oleh DPRD dengan rakyat adalah si wakil dan yang terwakili (Budiarjo, 1993 : 115).

Begitu juga dengan Dewan Pangwakil Rahayat Daerah Kabupaten Garut) merupakan mitra kerja pemerintah daerah Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. DPRD Kabupaten Garut memiliki 50 orang anggota yang tersebar di 9 partai politik, dan peneliti melakukan penelitian di daerah Kecamatan Samarang dengan dapil 5 yang terdiri dari 8 anggota yaitu Dra. Hj. Euis Ida Wartiah, M.Si, H. Ade Rijal, S.Ag, H. Dian Misparoni, H. Iden Sambas, S.Pd.I, Hasan Basri, Ir. Yayat Hidayat, Riki Muhamad Sidik, S.Sos dan Mamat Rahmat. Dengan amanat yang di emban tentunya masyarakat berharap kepada anggota yang terpilih di daerahnya menjadi berkembang dan maju. Maka DPRD Dengan demikian kedudukan serta keberadaan lembaga perwakilan rakyat mengandung arti penting dalam memperhatikan kepentingan rakyat yang dirumuskan dalam suatu kebijakan pemerintah sehingga diharapkan timbulnya keterpaduaan antara kebijakan yang di rumuskan dengan aspirasi dan partisipasi masyarakat secara aktif dan bertanggung jawab.

Maka untuk memadukan kebijakan dengan aspirasi, organisasi politik DPRD sangat dibutuhkan sebagai perantara yang digunakan anggota legislatif untuk mengelola dan membahas aspirasi tersebut. Organisasi politik DPRD yang

maksud meliputi kegiatan pembangunan di bidang lembaga keagamaan, lembaga adat dan organisasi masyarakat lainnya yang memiliki keterkaitan dalam tugas dan tanggung jawab anggota DPRD. Aspirasi yang di ajukan masyarakat terhadap DPRD dari wilayahh mereka sebagai jembatan untuk pembangunan dari berbagai bidang tersebut tentunya mempunyai harapan dan tujuan yang mulia yaitu demi kesejahteraan masyarakat. Aspirasi masyarakat adalah harapan dan tujuan dari masyarakat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak. Masyarakat harus di jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana dan kebijakan oleh pemerintah daerah dan DPRD dapil 5 yaitu di Kecamatan Samarang.

Cerminan tentang kinerja pegawai DRPD Kecamatan Samarang dapat di lihat dengan jelas dalam janji janji yang akan mereka bangun untuk daerah Kecamatan Samarang semasa dia kampanye mulai dari pembangunan ekonomi, sosial budaya dan pembangunan dalam bidang keagamaan. Semua proses dilakukan para calon agar dapat menduduki kursi pemerintahan yang tersedia. Namun setelah terpilih menjadi wakil rakyat, banyak yang berubah secara drastis bahkan ucapan janji-janji waktu pencalonan sampai sekarang belum terealisasi dengan baik . hal ini dapat di lihat dari keadaan sekarang di lingkungan kecamatan Samarang masih perlu pembenahan pembangunan di segala bidang. Jika hal seperti ini terus berkelanjutan, kepentingan dan aspirasi masyarakat tidak akan tertampung dengan baik dan optimal.

Gambaran tersebut merupakan cara pemikiran dan perilaku politik masyarakat Kecamatan Samarang. Banyaknya lembaga yang digunakan pada saat

pemilihan berbanding terbalik dengan harapan masyarakat terhadap calon tersebut. Masyarakat melihat bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk bertemu dan berdiskusi bersama calon yang mereka dukung pada masa pencalonan. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan waktu pencalonan anggota DPRD daerah pilihan wilayah 5 yang sering kelapangan sekarang tidak nampak lagi bahkan mau ketemu untuk menyuarkan aspirasi masyarakat saja susah dan harus mengikuti prosedur yang berlaku. Kegiatan penyerapan aspirasi yang diinginkan masyarakat Kecamatan Samarang yaitu dapat dilakukan dengan berbagai metode, misalnya dengan diadakannya reses tahunan, blusukan dengan melibatkan semua pihak yang mempunyai kepentingan untuk pembangunan kemajuan Kecamatan Samarang. Adapun permasalahan pembangunan aspirasi Masyarakat Kecamatan Samarang yang masih menjadi PR bagi anggota DPRD Dapil 5 Kecamatan Samarang Kabupaten Garut yaitu aspirasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi dan kemiskinan, aspirasi masyarakat mengenai masalah pendidikan dan spirasi masyarakat mengenai masalah pembangunan infrastruktur.

Dengan adanya permasalahan diatas merupakan tanggung jawab bersama terutama tanggung jawab bagi anggota DPRD wilayah 5 Kecamatan yang mewakili daerah Samarang Kabupaten Garut harus bisa menyelesaikan ke 3 masalah utama tersebut, dengan kedudukan dan kekuasaannya anggota DPRD harusnya mampu mewujudkan tujuan otonomi daerah dipandang dari aspek perundang undangan sebagai landasan hukumnya, telah membuka peluang yang seluas-luasnya memberdayakan dirinya untuk membangun dan sangat menentukan adalah lembaga-lembaga pemerintahan sebagai pemegang mandat dari rakyat. Untuk

mengetahui proses kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyerapan aspirasi masyarakat Kecamatan Samarang harus nya pemerintah daerah khususnya kepada anggota DPRD Dapil 5 Kecamatan Samarang bisa memperhatikan dan menjawab semua aspirasi masyarakat yang telah di utarakan diatas, maka dari itu peneliti tertarik untuk mendalami beberapa point diatas untuk melakukan kajian sejauh mana anggota DPRD dalam menanggapi dan menyelesaikan aspirasi masyarakat Kecamatan Samarang sehingga peneliti menarik kesimpulan dengan judul **“ANALISIS FUNGSI REPRESENTASI POLITIK DALAM MENERAPKAN ASPIRASI MASYARAKAT DI KECAMATAN SAMARANG TAHUN 2021”**

Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka peneliti mengemukakan pernyataan masalah (Reseach Problem) sebagai berikut: “Aspirasi yang belum terealisasi sepenuhnya oleh DPRD Dapil 5 Kecamatan Samarang”. Adapun permasalahannya (Reseach question) yaitu : Bagaimana Representasi Politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dapil 5 Kabupaten Garut Dalam Merespon Aspirasi Masyarakat Kecamatan Samarang ?

1.2 Pembatasan Masalah

Sebagaimana pembahasan dalam uraian latar belakang di atas, maka Batasan masalah penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini dibatasi hanya pada sudut pandang pelaksanaan Kinerja DPRD Dapil 5 dalam pembangunan yang di inginkan oleh Masyarakat di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut, karena

sampai saat ini aspirasi/keinginan masyarakat Kecamatan Samarang terkait pembangunan belum terealisasi dengan baik.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana analisis fungsi representasi politik dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dapil 5 Kabupaten Garut mengenai aspirasi masyarakat terkait pembangunan daerah di Kecamatan Samarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan dan menambahkan ilmu pengetahuan, serta wawasan dalam bidang kemasyarakatan mengenai pentingnya fungsi representasi politik dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dapil 5 Kabupaten Garut mengenai aspirasi masyarakat terkait pembangunan daerah di Kecamatan Samarang. Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Mengembangkan kemampuan berpikir penulis melalui penelitian dan sebagai penerapan dari berbagai teori yang penulis dapatkan selama dalam masa perkuliahan studi Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Siliwangi Tasikmalaya, diharapkan Penelitian ini dapat mengembangkan Ilmu Administrasi Negara terutama yang berkaitan tentang Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut Mengenai Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kecamatan Samarang.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman serta wawasan masyarakat mengenai fungsi representasi DPRD Dapil 5 dalam penyerapan aspirasi masyarakat dan menjadi bahan masukan bagi pemerintah Daerah Kabupaten Garut terutama DPRD tentang pentingnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam kemajuan pembangunan daerah.